



PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PT. KAWI AGUNG KENCANA

Eva Elida Sembiring

Magister Ilmu Manajemen Universitas Sumatera

(Naskah diterima: 1 Maret 2021, disetujui: 30 April 2021)

Abstract

The implementation of GCG in company management is very important because it will directly provide clear instructions for the company to make decisions appropriately and responsibly as well as enable the management of the company in a safer manner, so as to increase company value and the trust of business partners. The implementation of Corporate Governance in companies in Indonesia is still very low, this is due to a number of obstacles faced by these companies when the company tries to implement Corporate Governance for the realization of GCG principles properly. GCG has 4 basic principles, namely transparency, accountability, responsibility, independency and fairness. This study aims to determine and describe the extent to which the implementation of GCG principles at PT. KAWI AGUNG KENCANA . In addition, this study also aims to identify and describe what factors are obstacles and obstacles in the implementation of GCG principles.

Keywords: Good Corporate Governance, PT. KAWI AGUNG KENCANA

Abstrak

Pelaksanaan GCG dalam pengelolaan perusahaan sangat penting karena akan secara langsung akan memberikan petunjuk yang jelas bagi perusahaan untuk mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab serta memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih aman, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha. Pelaksanaan Corporate Governance di perusahaan-perusahaan di Indonesia masih sangat rendah, hal tersebut disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan Corporate Governance demi terwujudnya prinsip-prinsip GCG dengan baik. GCG memiliki 4 prinsip dasar yaitu transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Kemandirian (*Independency*), dan Kewajaran (*fairness*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PT. KAWI AGUNG KENCANA Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, PT. KAWI AGUNG KENCANA

I. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. GCG berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Implementasi GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Implementasi GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good governance pada umumnya di indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). GCG memiliki 5 asas yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan. Untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat perusahaan perlu menkaji ulang sejauh mana implementasi good corporate governance yang sudah diimplementasikan perusahaan dari prinsip transparency, accountability, responsibility, independence and Fairness. karena pada umumnya tujuan didirikannya semua perusahaan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun tidak memperhatikan penerapan atau implementasi tata kelola perusahaan yang baik Peranan good corporate

millenium baru sebagai strategi. Kombinasi kata-kata seperti keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja sosial perusahaan, go green dan "triple bottom line" semuanya merujuk untuk meningkatkan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang jangka panjang bagi perusahaan (Galpin, Whittington, & Bell, 2015). Bangsa dan bisnis telah berfokus pada "Doing good to look good" dengan sedikit rasa hormat untuk menanamkan pola pikir akan kebutuhan strategi keberlanjutan ke dalam strategi perusahaan atau strategi nasional (Fernando, 2012). "Doing good to look good" tersebut dapat dicapai dengan mengimplementasikan asas-asas Good Corporate Governance (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kesetaraan. Untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat perusahaan perlu menkaji ulang sejauh mana implementasi good corporate governance yang sudah diimplementasikan perusahaan dari prinsip transparency, accountability, responsibility, independence and Fairness. karena pada umumnya tujuan didirikannya semua perusahaan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun tidak memperhatikan penerapan atau implementasi tata kelola perusahaan yang baik Peranan good corporate

Menurut Elkington (1998), Keberlanjutan usaha telah menjadi keharusan bagi masa

governance tidak hanya diperlukan oleh perusahaan yang sahamnya dijual untuk umum atau TBK, namun juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan keluarga atau family business agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan agar mampu bersaing oleh perusahaan-perusahaan lain. Peranan good corporate governance pada perusahaan keluarga diperlukan untuk membuat suatu sistem pada perusahaan yang baik untuk menutupi kekurangan dari bisnis keluarga dan menyelaraskan seluruh organ perusahaan. Good corporate governance akan membuat perusahaan keluarga dapat berlangsung lama dari generasi ke generasi dan menghindari adanya konflik pada bisnis keluarga. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) - 2011 menjelaskan bahwa Corporate Governance adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya di dalam dan diluar perusahaan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya, atau sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan dari Corporate Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perusahaan. Menurut Daniri (2005), manfaat dari implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance

yaitu dapat: 1. Mengurangi agency cost, yang merupakan biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham sebagai akibat dari pelimpahan wewenang kepada manajemen. Biaya ini mungkin termasuk kerugian yang diderita oleh perusahaan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang (wrong-doing), atau dalam bentuk biaya pengawasan yang dikeluarkan untuk mencegahnya. 2. Mengurangi biaya modal (cost of capital). Sebagai hasil dari manajemen perusahaan yang baik, hal itu menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil sebagai penurunan tingkat risiko perusahaan 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus meningkatkan citra perusahaan di masyarakat untuk jangka panjang. 4. Menciptakan dukungan bagi para pemangku kepentingan di lingkungan perusahaan tentang keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga bisa mendapatkan manfaat maksimal dari semua tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kekayaan dan kemakmuran Menurut KNKG (2006) Di dalam Good Corporate Governance ada lima prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsi-

bilitas, independensi serta kewajaran atau kesetaraan. Kelima prinsip tersebut diperlukan untuk membantu perusahaan agar tercapai tujuannya kelima prinsip tersebut didefinisikan sebagai berikut: 1. Transparansi (Transparency) Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. 2. Akuntabilitas (Accountability) Terkait dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 3. Responsibilitas (Responsibility) Untuk prinsip responsibilitas atau prinsip tanggung jawab, perusahaan harus mematuhi peraturan perun-

dangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjalankan perusahaan dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 4. Independensi (Independency) Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain 5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus bisa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pengolahan kayu yang berdiri sejak 1985. Perusahaan dikelola oleh anggota keluarga pendiri dan pemilik saham adalah direktur dan komisaris. Jumlah pekerja pada perusahaan mencapai 300 karyawan. Penyampaian laporan keuangan diberikan kepada pemegang saham, pengendalian perusahaan dilakukan oleh direktur dan rapat umum pemegang saham pada perusahaan dilakukan secara informal oleh direktur dan komisaris. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas Penerapan Prinsip ± Prinsip

Good Corporate Governance pada Perusahaan Keluarga dalam Bidang Industri Transportasi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermakna untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2016). Pengertian lain dari penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yaitu sesuatu yang pasti, faktual, nyata, dari apa yang diketahui dan berdasarkan data empiris, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016). Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2016), sumber primer adalah sum-

ber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data yang digunakan oleh penulis diperoleh dari wawancara dengan berbagai narasumber dari subjek penelitian dan data sekunder berupa catatan tulisan hasil wawancara dan rekaman hasil wawancara yang dilakukan. Teknik penetapan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2016) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Sugiyono, 2016) adalah 1. Pengumpulan data Pada tahap ini peneliti mendapat informasi dari wawancara dan melihat melalui dokumentasi perusahaan. 2. Reduksi atau pemilihan data Pada tahap ini penulis mengumpulkan semua data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi dari perusahaan lalu penulis memilih data mana yang sesuai dengan hal yang ingin diteliti oleh penulis yaitu Good Corporate Governance. 3. Kategorisasi Dalam tahap ini peneliti menganalisis data yang didapatkan sesuai dengan kelima prinsip dalam Good Corporate Gover-

nance yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness dan mengumpulkan data ± data yang di dapat sesuai dengan masing ± masing kategori atau prinsip 4. Pemeriksaan keabsahan data Melakukan konfirmasi memastikan data yang diterima benar ± benar alamiah dan dapat diperlukan. Keabsahan data merupakan konsep validitas ataupun reabilitas dalam penelitian kualitatif 5. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Pada tahap ini kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

III. HASIL PENELITIAN

Good Corporate Governance pada perusahaan. Transparency Prinsip transparency (transparansi) dapat dilihat dari penyampaian visi dan misi, kemudahan sarana akses informasi, penyampaian informasi dari atasan ke bawahan, penyampaian informasi yang perlu dan tidak perlu diakses di dalam ataupun diluar perusahaan, penyampaian informasi kepada organisasi lain, proses pengambilan keputusan perusahaan, adanya Standar Operasional Perusahaan (SOP) sebagai patokan subjek penelitian dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional. Sesuai dengan panduan KNKG

(2006) yang menjelaskan bahwa, transparansi menekankan pada perusahaan yang harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Demikian juga dengan Sutedi (2011) yang menjelaskan bahwa, transparansi yaitu penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders. Dalam hal sarana dan penyampaian informasi, subjek penelitian telah menyampaikan informasi yang mudah diakses oleh konsumen melalui adanya website, juga penyampaian informasi kepada organisasi lain dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman, surat atau pada saat meeting. Selain itu penyampaian informasi dalam internal juga dilakukan secara terbuka terlihat dari penyampaian dari atasan ke bawahan yang dilakukan secara berjenjang, namun subjek penelitian menyampaikan informasi sesuai batasanbatasan dan hak-haknya. Kemudian prinsip transparansi juga terlihat pada pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah melalui meeting namun tetap melalui kebijakan direktur, seperti halnya KNKG (2006) yang mengungkapkan bahwa, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-unda-

ngan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Subjek penelitian masih belum maksimal mengimplementasikan GCG melalui prinsip transparansi yang terlihat dari kurangnya sosialisasi atau penyampaian visi dan misi secara langsung kepada karyawan, namun lebih dilakukan secara tertulis yang terdapat pada spanduk atau banner dan juga ID Card pada masing-masing karyawan. Disisi lain, visi dan misi merupakan hal yang penting agar proses bisnis dalam perusahaan terarah. Accountability Prinsip accountability (akuntabilitas) dapat dilihat dari struktur organisasi, rangkap pekerjaan, kesesuaian tugas dengan kemampuan karyawan, kinerja karyawan, pencapaian target, pembentukan audit internal dan proses audit pada subjek penelitian, forum RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan code of conduct. Menurut KNKG (2006) perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa subjek penelitian telah memi-

lik struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan sudah tertulis beserta job description, sehingga tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi secara jelas, terarah dan tidak terjadi rangkap pekerjaan pada divisi. Selain itu, pemberian tugas dan tanggung jawab juga sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing organisasi. Dalam struktur organisasi yang ada pada subjek penelitian tidak pernah menyelenggarakan forum RUPS dan hanya mengadakan tinjauan manajemen. RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (KNKG 2006). Selain itu struktur organisasi subjek penelitian masih belum sesuai dengan UU PT no 40 tahun 2007. Dalam hal akuntabilitas yang menuntut perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, subjek penelitian melakukan penilaian kinerja dari awal masuk, kemudian job training dan juga penilaian dari pengawas atau atasan ketika bekerja. Demikian juga dalam penerapan reward and punishment yang dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang mencapai

target namun juga memiliki punishment yang diberikan jika karyawan masih tidak mencapai target setelah diberikan peringatan, disisi lain Whittaker dalam BPKP (2000) menjelaskan bahwa, pengukuran kinerja dapat dijadikan alat oleh manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dalam akuntabilitas, subjek penelitian memiliki tim audit internal untuk memelihara pengendalian internal yang efektif agar dapat mencapai tujuan, yang mana proses audit dilakukan dengan cara silang departemen dan yang berhak melakukan evaluasi dari hasil audit adalah kepala departemen yang dikenakan audit. Hal ini didukung Sutedi (2011) yang menjelaskan bahwa, setiap hal yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan perusahaan itu harus dilaporkan atau harus diketahui oleh stakeholders, itu semua adalah bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan kepada stakeholders. Dalam mengimplementasikan prinsip akuntabilitas, subjek penelitian memiliki code of conduct yang mengatur semua tata cara atau perilaku perusahaan terhadap pemangku kepentingannya dan juga mengatur bagaimana perilaku karyawan dalam berinteraksi dengan sesama karyawan. Code of conduct dalam subjek penelitian selalu disosialisasikan kepada karyawan. Kode

etik dalam suatu perusahaan penting karena pada setiap profesi apapun, kode etik yang ditetapkan oleh lembaga professional akan menambah nilai bagi profesi tersebut (Sawyer, et al., 2005). Secara keseluruhan menunjukkan bahwa subjek penelitian telah mengimplementasikan GCG sesuai prinsip akuntabilitas, hanya subjek penelitian perlu menyesuaikan struktur organisasi perusahaan sesuai dengan UU PT no 40 tahun 2007 dengan harapan dapat melaksanakan forum RUPS. Responsibility Prinsip responsibility (responsibilitas) dapat dilihat dari CSR (Corporate Social Responsibility) kepada masyarakat, tanggung jawab kepada karyawan, tanggung jawab kepada konsumen dan kepatuhan perusahaan terhadap hukum. Hal ini mengacu pada KNKG (2006) yang menjelaskan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa subjek penelitian telah menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat sekitar dengan menerapkan program CSR sesuai dengan UU no 32 Tahun 2009, mengingat kegiatan produksi

perusahaan yang menghasilkan polusi atau limbah. Dalam hal ini, subjek penelitian memiliki instalasi B3 dan instalasi air limbah yang mengubah air limbah menjadi air bersih. Hal ini sejalan dengan Wibisono (2007) yang menyatakan bahwa, prinsip responsibility sebagai salah satu dari prinsip GCG merupakan prinsip yang mempunyai hubungan yang dekat dengan CSR. Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Dalam hal tanggung jawab kepada karyawan, subjek penelitian telah memberikan jaminan keselamatan kerja dan memberikan asuransi kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu subjek penelitian juga memberikan gaji yang sudah disesuaikan dengan standar Upah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK) serta memberikan cuti sesuai dengan aturan yang ada. Subjek penelitian juga menunjukkan tanggung jawab kepada konsumen dalam implementasi prinsip responsibilitas yang terlihat dari pemenuhan kebutuhan konsumen dengan memberikan produk terbaik dan pelayanan yang menyenangkan juga melalui program CSR. Selain itu, dalam implementasi responsibilitas subjek penelitian juga memenuhi tanggung jawab kepada Negara dengan

mematuhi hukum yang berlaku salah satunya dengan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Hal ini sejalan dengan Zarkasy (2008) yang menyebutkan bahwa, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Independency Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada organisasi di perusahaan yang bertanggung jawab kepada organisasi lain, juga tidak ada organisasi perusahaan yang melakukan pekerjaan sama karena sudah memiliki jobdesk masingmasing. Selain itu dalam mengimplementasikan prinsip independency (independensi), subjek penelitian tidak terlihat adanya benturan kepentingan antara stakeholder dan shareholder. yang sejalan dengan pernyataan Zarkasy (2008) bahwa, dalam menerapkan prinsip independensi perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing organisasi perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala

pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. Kemudian juga tidak ada anggota keluarga yang tidak ikut memiliki saham tapi ikut mengambil keputusan dalam perusahaan, juga pemerintah hanya mengatur tentang peraturan ketenagakerjaan dan lain-lain tidak ikut mengambil keputusan di dalam operasional perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek penelitian telah melaksanakan GCG sesuai prinsip independency, sejalan dengan KNKG (2006) yang menjelaskan bahwa, untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

IV.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada subjek penelitian implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada subjek penelitian yang sejauh ini diterapkan terdapat dua elemen yang tidak sesuai dengan pedoman Good Corporate Governance yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Pada prinsip transparansi pada subjek penelitian dapat dikatakan sudah baik. Namun akan lebih baik jika perusahaan menyampaikan Visi dan Misi perusahaan secara lisan dengan jelas kepada seluruh pekerja di

perusahaan Pada prinsip akuntabilitas pada sudah baik tapi belum sepenuhnya terlaksanakan, yang terlihat dari struktur organisasi yang belum sesuai dengan UU PT no 40 tahun 2007, dan belum melaksanakan forum RUPS Pada prinsip responsibilitas pada subjek penelitian dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari perusahaan yang memenuhi tanggung jawabnya kepada lingkungan, konsumen, karyawan, dan negara. Pada prinsip Independensi pada subjek penelitian dapat dikatakan sudah sangat baik, yang terlihat dengan tidak pernah adanya benturan kepentingan antar stakeholder dan shareholder. Pada prinsip kesetaraan dan kewajaran pada subjek penelitian dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal ini terlihat dengan adanya perlakuan perusahaan yang adil dan setara kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan adanya peraturan yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham serta komposisi pekerja pada subjek penelitian diusahakan berimbang tanpa membedakan suku, ras, dan agama

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika

Australian Security Exchange. (2014). Corporate Governance Council (3rd ed.). 20 Bridge Street: Sydney NSW

Atkisson, A. (2002). The ISIS Accelerator Overview.

Atkisson Inc. Retrieved May 3, 2017, from <http://atkisson.com/tools>

Bastida, E., Maria, R., Franco, L., & Kreiner, G.I. (2013). Analysis of Indicator to Evaluate the Industrial Parks Contribution to Sustainable Development. Management Research Review, Vol. 36 Iss 12 pp. 1272-1290

Cabalu, H. (2005). Reforms in Corporate Governance in Asia After the Financial Crisis. Advances in Financial Economics, 11, 51±73. [https://doi.org/10.1016/S1569-3732\(04\)11003-7](https://doi.org/10.1016/S1569-3732(04)11003-7)

Cochran, S. (2016). Ecosystems matter, (September).

Daniri, M. A. (2005). Good Corporate Governnace: Konsep dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Penerbit Ray Indonesia

Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business, Capstone: Oxford

Fernando, R. (2012). Sustainable globalization and implications for strategic corporate and national sustainability. Corporate Governance, 12(4), 579±589. <https://doi.org/10.1108/14720701211267883>

Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2011). What is Corporate Governance. Retrieved May 3, 2017, from <http://www.fcgi.or.id/corporategovernance/about-good-corporate-governance.html>

Galpin, T., Whittington, J. L., & Bell, G. (2015). Is your Sustainability Strategy Sustainable? Creating a Culture of Sustainability. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 15(1), 1± 17. <https://doi.org/10.1108/CG-01-2013-0004> Komite Nasional Kebijakan

Governance. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, 30. Retrieved from www.governanceindonesia.or.id

Kowalewski, O. (2008). Management Research Review Corporate governance and corporate performance: financial crisis (2008). Management Research Review Iss Iss Management Research Review Iss, 39(11), 1494± 1515. <https://doi.org/10.1108/MRR-12-2014-0287>

Moleong, J. L. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Moleong,

J. L. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya

OECD. (2004). Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publication Service Peraturan Menteri Badan Usaha

YAYASAN AKRAB PEKANBARU

Jurnal AKRAB JUARA

Volume 6 Nomor 2 Edisi Mei 2021 (210-221)

Milik Negara Nomor:
KEP117/M/MBU/2002,
tentang
Penerapan Praktek Good Corporate
Governance pada BUMN.

Retrieved May 3, 2017, from
[http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/download
_pdf.php?pdf=BUMN_117_2002pdf.pdf](http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/download_pdf.php?pdf=BUMN_117_2002pdf.pdf)

Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia.
(2014). Menuju Tata Kelola Emiten dan
Perusahaan Publik yang Lebih Baik

Sawyer, B. Lawrence et al. 2005. Internal
Auditing sawyer, 5th edition. Florida:
The Institute Of Internal Auditors

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Penerbit CV Alfabeta

Svensson, G., & Wagner, B. (2012). Business
Sustainability and E-
IRRWSULQWVRQ(DUWK¶V/LIHDQ
G(FR system: Generic Models.
European Business Review, Vol. 24 Iss
6 pp. 543-552

The World Bank. (2015). Improving
Corporate Governance in Emerging
Markets.

Retrieved May 3, 2017, from
http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/Corporate_Governance_Introduction.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas

Whittaker dalam BPKP Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (2000)

Wibisono, Y. (2007). Membedah Konsep &
Aplikasi CSR (Corporate Social
Responsibility). Gresik: Fascho
Publishing